

PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN

(Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

Imroatus Solekah, Djoko Wahyudi

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: wahyuq2@gmail.com

Abstrak

Community Self-Reliance Agency (BKM) Mulyo Lestari is community organization formed and managed independently by people in Jatimulyo Village, District of Kauman, Tulungagung Regency. The establishment of BKM Mulyo Lestari is none other than to improve people's standard of living through the community's active participation and initiative. The purpose of this research was to describe the roles of BKM Mulyo Lestari in National Program for Community Empowerment-Urban (PNPM MP). The research used qualitative method. Informants were determined by purposive technique. Data were collected by observation, interviews, and documentation. After collected, data were analyzed. In testing the validity of data, the research used source triangulation technique. The research findings showed that the roles of Community Self-Reliance Agency (BKM) in National Program for Community Empowerment Urban in Jatimulyo Village, District of Kauman, Tulungagung Regency) were: Participatively organizing the community: organizing the community in participatory planning; decision-making council: policy makers, promoting and upholding the values, fostering empowerment activities such as economy, environment and social, developing networks, as well as supervising the implementation process of BLM (Community Grants). The roles of BKM Mulyo Lestari in National Program for Community Empowerment Urban were as follows:

- 1. Participatively organizing the community: organizing the community in participatory planning, performing the roles as group coordinator and facilitator.*
- 2. Decision-making Council: policy makers, performing the roles as facilitator and social planner.*
- 3. Promoting and upholding the values, performing the role as facilitator.*
- 4. Growing various empowerment activities such as: in economy; performing the roles as researcher, enabler and broker; environment performing the roles as facilitator; and social; performing the roles as facilitator and broker.*
- 5. Expanding networks, performing the role as a broker.*
- 6. Supervising the implementation of BLM, performing the role as supervisor/ broker-quality control.*

Keywords: roles, BKM Mulyo Lestari

Pendahuluan

Secara umum kemiskinan di Indonesia memang di dominasi pedesaan, namun angka kemiskinan di perkotaan tidak dapat diremehkan. Indonesia-Investments dalam laporannya menyebutkan bahwa sejak pertengahan 1990-an

jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota). (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2014 <http://www.indonesiainvest>

[ments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301\)](https://www.researchgate.net/publication/301111111)

Respon atas kejadian ini adalah dengan penanggulangan kemiskinan dipertanyaan, sehingga pemerintah meluncurkan program khusus yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

Di Jawa Timur, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung termasuk daerah yang melaksanakan dan mendukung program PNPM MP. Desa Jatimulyo menjadi penerima program PNPM MP karena memiliki KK miskin $\leq 10\%$. Desa Jatimulyo merupakan wilayah paling utara di Kecamatan Kauman berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Karangrejo. Desa Jatimulyo termasuk wilayah strategis karena letaknya yang berada di percaturan transportasi yang menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Kauman dan Karangrejo. Namun karena tingkat kesadaran pendidikan yang masih rendah dan kurang memadainya fasilitas umum maka berefek pada jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, BKM Mulyo Lestari memiliki program-program yang disesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ala PNPM MP yang dikenal dengan Tridaya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka tujuan dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)?

Tinjauan Pustaka

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Terbentuknya BKM merupakan kesadaran masyarakat akan masalahnya dan merupakan salah satu tahapan siklus awal PNPM MP yang disiapkan untuk menjadi sebuah lembaga yang representatif dan mengakar di masyarakat. Dengan adanya lembaga ini di harapkan tujuan PNPM MP untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai intervensi program-program pemberdayaannya akan tercapai. Sebagai sebuah lembaga BKM berada diluar lembaga desa atau pemerintah, militer maupun agama. Saat ini BKM dipimpin oleh seorang pemimpin kolektif untuk memudahkan arah koordinasi. Anggota BKM merupakan masyarakat lokal yang membantu menjalankan kegiatan PNPM MP di wilayah tersebut dimana semua anggota BKM dipilih melalui tahapan pemilu yang demokratis dari tingkatan RT, RW, dusun dan kelurahan. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota BKM, kriterianya adalah jujur, amanah, dapat dipercaya, punya kepedulian terhadap orang miskin.

Pada dasarnya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu masyarakat warga penduduk kelurahan/desa dengan fungsi utama mengendalikan atau mengemudikan (*steering*) kegiatan penanggulangan kemiskinan dikelurahan tersebut. Jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta tidak terlibat dengan kegiatan praktis – pelaksanaan (*rowing*) karena akan mudah terperangkap pada situasi konflik kepentingan (Departemen Pekerjaan Umum, Tanpa Tahun).

BKM memiliki beberapa peran, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Mengorganisasikan warga secara partisipatif

Mengorganisasikan atau organizing sendiri dalam kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat ke dalam suatu forum, kemudian di dalam forum inilah kegiatan mengumpulkan pendapat dan kebutuhan terutama masyarakat miskin di gali, dilakukan survei dan selanjutnya dikategorikan kebutuhan prioritas.

Dalam kegiatan ini partisipasi masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif sangat dibutuhkan. Menurut KBBI online (<http://kbbi.web.id/organisasi> diakses pada tanggal 15 September 2014) mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun bagian (orang dsb) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Lebih lanjut Ross Murray (2000) menjelaskan pengorganisasian masyarakat adalah Suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan - kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber - sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar dengan usaha secara gotong royong.

Bila dilihat dari beberapa penjelasan di atas maka pengorganisasian masyarakat yang dilakukan BKM mengarah pada kegiatan untuk menyadarkan, mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi mandiri dalam mengelola masalah beserta solusi atau jalan keluarnya.

B. Dewan pengambil keputusan

Dalam sumber online ([http://www.psikologizo.com/decision-making-pengambilan-](http://www.psikologizo.com/decision-making-pengambilan-keputusan/06511842)

[keputusan/06511842](http://www.psikologizo.com/decision-making-pengambilan-keputusan/06511842) diakses pada tanggal 15 September 2014) mengatakan pengambilan keputusan (decision making) dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana anggota organisasi memilih mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap peluang atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya Beach & Connolly, 2005 (dalam Moordiningsih *Jurnal Psikologi* Volume 33, No 2,1 – 15) mengatakan bahwa Pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu peristiwa yang meliputi diagnosa, seleksi tindakan dan implementasi. Pengambilan keputusan dalam BKM pada dasarnya dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang biasa dilakukan secara langsung. Musyawarah mufakat adalah suatu perundingan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memecahkan sekaligus menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Dalam proses musyawarah ini dibutuhkan komunikasi yang baik agar proses musyawarah dapat berjalan.

C. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan dan demokratis)

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:81). Penegakan nilai keadilan yang dilakukan BKM sesuai dengan salah satu karakteristik good governance dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu prinsip berkeadilan (equity) yang berbunyi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

Dalam Damodiharjo (2006:161), Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam BKM untuk meningkatkan kepercayaan, menguatkan ikatan dan kerjasama di antara mitra yaitu BKM dan masyarakat.

D. Pemberdayaan masyarakat miskin

Menurut Suharto (2005:59), Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Payne menjelaskan (dalam Fahrudin, 2011:35) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM dalam PNPM MP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam program Tridaya yaitu daya ekonomi, sosial dan lingkungan.

E. Mengembangkan Jaringan

Menurut Sargent (dalam Santoso, 1999). Kerjasama merupakan suatu usaha terkoordinasi yang diarahkan menuju suatu tujuan. Walker (1992) menjelaskan bahwa kerjasama dalam bekerja ditujukan untuk mencapai keberhasilan dengan tidak mendasarkan pada kepentingan pribadi tetapi lebih utama untuk kepentingan bersama menyamakan kepentingan dengan yang lain yang bersifat kepercayaan mutualistik dengan tujuan akhir kerjasama yang efektif.

F. Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Astuti (2003:162) menjelaskan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan.

Jadi kegiatan monitoring ini dilakukan untuk meneliti atau memantau secara terus-menerus untuk melihat hasil nyata dari perencanaan yang telah dilakukan untuk proses evaluasi. Sementara evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai pekerjaan, manfaat, dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan

2. Peran Pekerja Sosial

Spergel, Zastrow, dalam Adi (2003:89) menjelaskan bahwa peran pekerja sosial adalah sebagai:

- Pemercepat perubahan (*enabler*)
- Perantara (*broker*)
- Pendidik (*educator*)
- Tenaga ahli (*expert*)

Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

- Perencana sosial (*social planner*)
- Advokat (*advocate*)
- Aktifis (*activist*)

Dalam sumber online (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo34.htm. diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) Suharto mengatakan bahwa ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat yaitu:

- Fasilitator.
- Broker.
- Mediator.
- Pembela.

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mulyo Lestari Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Diharapkan metode ini mampu menjawab rumusan masalah serta mampu menggali data yang diinginkan oleh peneliti. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2012:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Salah satu alasan menggunakan kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami.

Tipe penelitian deskriptif menurut Moleong (2012:11) merupakan, Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya

dimana itu semua berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta memperjelas masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah wilayah Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulugagung.

Informan merupakan bagian dari data yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan, metode yang digunakan dalam penentuan informan menggunakan *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2010: 53) *purposive sampling* ialah:

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data serta dalam analisisnya.

Selanjutnya analisa data yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan pengumpulan data mentah, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan dalam kesimpulan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Menurut Bogdan (dalam Sugiyono (2010: 88) :

“Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

Selanjutnya metode keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Hal ini sangat berguna untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan PNPM MP tanpa BKM bisa dipastikan kegiatan tersebut tidak berjalan mulus, keberadaan BKM memang diwajibkan dalam siklus PNPM MP lebih dari itu BKM adalah wadah organisasi masyarakat dimana semua kegiatan PNPM MP dimulai disini. Berjalannya program PNPM MP di desa jatimulyo juga tidak lepas dari peran BKM Mulyo lestari. Menurut Achlis (1983: 33), "Peran adalah pola tugas dan tingkah laku yang diharapkan berkaitan dengan status sosial tertentu, yang diekspresikan menurut pengertian dan batasan-batasan tertentu serta berkaitan dengan tingkah laku dan relasi orang lain".

Sejarah terbentuknya BKM Mulyo Lestari terdorong dari kebutuhan siklus PNPM MP yang mewajibkan adanya suatu wadah atau kelembagaan lokal yang dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tujuan dari dibentuknya lembaga lokal ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. anggota BKM Mulyo Lestari dipilih untuk masa bakti 3 tahun dengan tiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat dilakukan reshuffle jika diperlukan atau pilihan ulang. Jumlah anggota BKM Mulyo Lestari ini maksimal adalah 15 dan minimal adalah 7 orang yang di tetapkan dalam rembug warga dan sifat keanggotaannya adalah kerelawanan, untuk BKM Mulyo Lestari saat ini anggotanya berjumlah 13 orang, jumlahnya harus ganjil agar mudah mencapai quorum dalam mengambil keputusan serta

minimum harus melibatkan 30% dari unsur perempuan sebagai anggotanya. Saat ini BKM Mulyo Lestari memiliki 5 orang anggota perempuan dan memiliki 8 orang anggota laki-laki.

BKM Mulyo Lestari menerima alokasi dana BLM yang pertama sebesar Rp.250.000.000, sampai saat ini dana BLM PNPM MP yang telah dialokasikan dan telah didistribusikan oleh BKM Mulyo Lestari sebesar Rp. 1.075.000.000, sejak awal pembentukannya BKM Mulyo Lestari berkomitmen dan fokus pada penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan Tridaya yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk kegiatan ekonominya, BKM Mulyo Lestari mengupayakan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemberian modal usaha berupa uang melalui pinjaman yang mudah dan ringan kepada masyarakat yang tergabung dalam KSM, kegiatan ini diberinama ekonomi bergulir.

Besaran berupa pinjaman bergulir untuk KSM pada awal berdirinya maksimal yang bisa diberikan adalah sebesar Rp.500.000 per-KSM, namun pada tahun 2013 BKM Mulyo Lestari mampu memberikan pinjaman pada KSM sebesar Rp.1000.000. Untuk kegiatan sosialnya melakukan kegiatan berupa penggemukan kambing, unggas bergulir, realisasi bantuan sarana produksi sari kedelai dan temak telur puyuh, peningkatan kesehatan balita-lansia dengan menjalin kerjasama dengan posyandu kelurahan dan pendidikan dengan pengadaan bantuan beasiswa untuk siswa tidak mampu. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan dengan melakukan penataan lingkungan baik sanitasi, perbaikan jalan

dan rumah tidak layak huni. Adapun peran yang dilakukan oleh anggota BKM Mulyo Lestari adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian masyarakat secara partisipatif: pengorganisa-sian masyarakat dalam perencanaan partisipatif

Perencanaan adalah serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang mencakup kegiatan/program yang akan dikerjakan, tujuan kegiatan, alat dan bahan, prosedur serta alternatif kebijakan. Perencanaan dalam kegiatan PNPM MP Desa Jatimulyo dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari bersama-sama dengan masyarakat dan juga pemdes. Hanif,dkk (2009:11) menjelaskan bahwa model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif.

“Untuk perencanaan ini dari bawah itu tadi mbak. Jadi mulai dari RK PS nah itu yang menentukan masyarakat. *Nggih* (iya) setelah ada usulan itu kan nanti di lakukan survei lokasi seperti kegiatan lingkungan terutama lingkungan *nggih* (begitu) lingkungan *meniko* (itu) dilakukan survei lokasi untuk *mereng-reng* (menafsir) berapa pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan *kados* (seperti) paving terus saluran *nggih nopo* (iya apa) rehap rumah *malih nggih* (lagi) WC”. (AN: Januari 2014)

Dalam pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif ini, BKM Mulyo Lestari menjalankan peran pekerja sosial sebagai koordinator dan fasilitator grup. Zatrow (2011:41) sebagai koordinator, Pekerja Sosial melibatkan seluruh komponen bersama-sama secara terorganisir untuk menyelesaikan permasalahan klien. Dalam fasilitator grup, Pekerja Sosial berfungsi sebagai pemimpin untuk diskusi kelompok bersama klien.

2. Dewan Pengambil Keputusan

BKM sebagai dewan pengambil keputusan, merupakan salah satu fungsi BKM sebagai penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin. Peran sebagai dewan pengambil keputusan ini diberikan kepada BKM Mulyo Lestari karena memiliki legalitas dari masyarakat untuk memimpinya dan mewakilinya. William R. Dill (dalam *National Society For The Study Of Education* halaman 201) mengatakan bahwa pembuatan keputusan merupakan proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah.

“Perannya itukan melibatkan diri di setiap programnya P2KP dengan tidak mengharapkan imbalan sepeserpun yah memang tidak dibayar. Yang BKM itu biasanya tim em apa yah perencana. Jadi setiap tanggal 13 itu ada rapat rutin yang dihadiri oleh BKM itu. Agenda utamanya adalah membicarakan tentang bantuan dana bergulir dan program-program yang ada. Tugasnya iya itu tadi kan di PNPM itu ada PJM jangka pendek menengah nah itukan di yang menyusun itukan BKM atas dasar masukan dari warga. Misal jika ada dana lagi itu akan digunakan untuk apa. Yah menghadiri rapat-rapat karena bersinergi dengan Pemdes berhubungan langsung dengan BAPPEDA. Peran utamanya yah merencanakan apa yang akan dilakukan dilingkungan.”(AS: Desember 2013)

Dalam hal ini BKM Mulyo Lestari BKM Mulyo Lestari berperan sebagai pengambilan keputusan dengan menjalankan fungsi pengambilan kebijakan dan sebagai perencana sosial. Dalam hal ini BKM Mulyo lestari melakukan peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dan perencana sosial. Menurut Suharto (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm. diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) fasilitator bertujuan untuk

membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Peran sebagai fasilitator ini terlihat dalam dibuatnya kebijakan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan lingkungan, ekonomi dan sosial. Sementara Adi (2003:89) menjelaskan Peran perencana sosial membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas, menganalisis, dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Peran sebagai perencana ini terlihat dalam kegiatannya menyusun program-program berjangka.

3. Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur

Penerapan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis ini dapat dengan mudah kita jumpai pada penyelenggaraan perencanaan partisipatif seperti pada penentuan skala prioritas yang dikenal juga dengan nama perangkingan usulan. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat Jatimulyo yang telah dewasa.

“Sebelum kegiatan itu *ngundang* rapat masyarakat (KSM) dulu, masyarakat (KSM dan warga setempat) mengusulkan lingkungannya yang rusak apanya dicatat terus *direngking* (dirangking) disusun mana yang perlu diprioritaskan. BKM hanya memantau, memberi arahan, membantu mereng-reng kerusakannya. Biar biar nanti dananya tidak dilebih-lebihkan. Usulan itu semua ya dari masyarakat saja” (AS: Desember 2013) Dalam kaitannya dengan kegiatan musyawarah partisipatif penentuan skala prioritas ini, menurut Ilmu Kesejahteraan Sosial BKM Mulyo Lestari telah menjalankan peran sebagai fasilitator dalam sudut pandang Pekerja Sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Suharto (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm.

diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) bahwa Peran sebagai pemungkin atau fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian danendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

4. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Seperti yang dijelaskan Payne (dalam Fahrudin, 2011) bahwa suatu proses pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam program Tridaya yaitu daya ekonomi, sosial dan lingkungan.

A. Ekonomi

Tridaya bidang ekonomi adalah kegiatan yang berwujud pemberian pinjaman bergulir berskala mikro yang diberikan pada masyarakat khususnya masyarakat miskin yang belum memiliki akses pinjaman pada lembaga keuangan. pada tahun 2013 BKM Mulyo Lestari dapat

Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimuhyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

menggulirkan dana untuk ekonomi bergulir sebesar Rp. 11.500.000 yang terbagi kedalam dua tahap. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai modal usaha, diantaranya seperti modal membuka toko kelontong, modal membuka jasa menjahit dan modal untuk membesarkan usaha yang telah ada.

“Tahun 2012 kemarin untuk kegiatan sosial itu untuk pelatihan pelatihan pakan temak itik terus setelah itu juga ada untuk penambahan gizi balita kalau yang di penambahan gizi balita ini diambilkan dari dana alokasi mbak jadi bukan dana dari BLM dari hasil laba UPK setiap tahun itu dialokasikan untuk kegiatan lingkungan sosial terus penambahan ekonomi kalian pengawas di UP. Jadi laba dari pinjaman UPK itu setiap akhir tahun dialokasikan untuk kegiatan itu” (AN: Januari 2014).

Dalam kegiatan ini ada beberapa peran Pekerja Sosial yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari yaitu sebagai *researcher, enabler* dan *broker*. Zastrow (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) mengatakan bahwa sebagai *researcher* Pekerja Sosial disini dapat menjadi peneliti. Sebagai pekerja sosial membantu individu dan kelompok untuk mengartikulasikan kebutuhan, mengidentifikasi masalah klien dan mengembangkan kapasitas klien untuk memahami masalah. Terakhir adalah peran sebagai broker, Menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat tetapi tidak tahu bagaimana dan dimana mendapatkan bantuan tersebut.

B. Lingkungan

Tridaya lingkungan adalah kegiatan yang berorientasi pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan dengan tujuan meningkatkan pembanguan infrastruktur termasuk perumahan/pemukiman dasar untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perumahan/ pemukiman yang direalisasikan harus memnuhi unsur-unsur seperti sehat, layak, terjangkau, aman, teratur, serasi dan produktif.

“Apa lagi yah mbak, yah hanya itu seperti melebarkan jalan, rapat BKM soal lingkungan, rapat undangan kantor desa, ini PLPBK masih setengah saya di bagian WC dengan mbak I.(AP: Januari 2014)”

Dalam kegiatan ini, BKM Mulyo Lestari telah menjalankan peran pekerja sosial sebagai fasilitator. Suharto (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) fasilitator disebut juga sebagai pemungkin.

C. Sosial

Kegiatan Tridaya bidang sosial atau daya sosial adalah kegiatan yang berorientasi pada membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dengan cara meningkatkan potensi masyarakat terutama masyarakat rentan dan marginal yang kurang beruntung.

“Kalau sosialpun juga banyak seperti beasiswa anak sekolah kemudian *anu ee* orang jompo, memberikan santunan anak yatim, beasiswa untuk anak SMP terus memberikan pinjaman modal di ekonomi bergulir”.(AS: Desember 2013)

Dalam kegiatan ini, BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator dan broker.

Suharto

([http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34 .htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm), diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) mengatakan bahwa fasilitator bertujuan untuk membantu klien agar menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Dalam konteks PM, peran pekerja sosial

Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)

sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal.

5. Mengembangkan Jaringan

Pelaksanaan program *channeling* atau kemitraan merupakan salah satu bukti telah terjadi kemandirian dalam BKM. Dalam hal *channeling* ini BKM Mulyo Lestari melakukan kerja sama baik dengan pihak pemerintah maupun swasta.

“Selain PLPBK juga ada kegiatan *channeling* dengan satuan-satuan kerja yang ada di daerah Tulungagung tapi ini dalam proses. Kita disuruh sabar menunggu hasil *channeling*, agar desa ini bisa berubah positif sesuai dengan visi misi BKM Mulyo Lestari” (AM: Desember 2014)

BKM Mulyo Lestari dalam hal *channeling* hanya membangun dan menjalankan kerjasama dengan pihak luar untuk dapat mengakses bantuan berupa modal ataupun lainnya melalui kerjasama yang disepakati. Jika melihat dari sudut pandang peran yang BKM Mulyo Lestari lakukan maka menurut Suharto (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_34.htm, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai broker.

6. Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Astuti (2003:162) menjelaskan bahwa *monitoring* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan. Jadi kegiatan monitoring ini dilakukan untuk meneliti atau memantau secara terus-menerus untuk melihat hasil nyata dari perencanaan yang telah dilakukan untuk proses evaluasi. Sementara evaluasi sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai pekerjaan, manfaat, dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

“Kalau dibangun (program kegiatan lingkungan) saya selalu datang, tapi percaya atau tidak mbak orang sebanyak itu hanya saya yang perempuan disana. Jalan yang jurusannya Ngledok (Desa tetangga) itu setiap

hari saya kesana menunggu (memantau kegiatan) sendiri mbak. Namanya perempuan membantu sebisanya apa yang perlu.”(AP: Januari 2014)

Dalam mengawasi pemanfaatan dana BLM, kegiatan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah dengan mengecek dan memantau langsung kelokasi sasaran program

Dalam kegiatan pengawasan proses BLM ini, BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran Pekerja Sosial sebagai broker dengan menjalankan prinsip *Quality Control*. Seperti yang dijelaskan oleh Suharto (http://www.policchu/suharto/modul_a/makindo_34.htm, diakses pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 17.18 WIB) *Quality control* sendiri adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan *monitoring* yang terus menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), secara umum BKM Mulyo Lestari telah dapat melaksanakan perannya baik dalam mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif, dewan pengambilan keputusan, mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur, menumbuhkan kegiatan pemberdayaan

masyarakat miskin, mengembangkan jaringan dan mengawasi proses BLM. Maka di diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Masyarakat Secara Partisipatif: Pengorganisasian masyarakat dalam perencanaan partisipatif.

Dalam kegiatan ini BKM Mulyo lestari menjalankan dua perannya yaitu: sebagai koordinator (penggerak dan pengatur) dan *group facilitator* (fasilitator grup). Sehingga dapat diketahui juga bahwa semua peran yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dewan Pengambilan Keputusan

Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan dua perannya yaitu: sebagai fasilitator dan perencana sosial. Dengan menjalankan peran ini BKM Mulyo Lestari dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mempromosikan dan Menegakkan Nilai-Nilai Luhur

Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan peran sebagai fasilitator. dengan menjalankan peran fasilitator ini BKM Mulyo Lestari membantu masyarakat untuk terbiasa terlibat dalam kegiatan umum, membiasakan masyarakat untuk dapat mengenali masalah dan solusinya namun dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti jujur, adil, transparan dan demokratis.

4. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM Mulyo Lestari dilakukan melalui berbagai kegiatan yang terangkum dalam Tridaya yaitu:

A. Ekonomi

Dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah menjalankan peran sebagai *researcher*, *enabler* dan *broker*. Dengan menjalankan peran ini, BKM Mulyo Lestari telah menyediakan akses dengan cara mencaritahu sumber masalah, mengupayakan solusinya dan menghubungkan masyarakat dengan sumber modal.

B. Lingkungan:

Dalam kegiatan ini BKM Mulyo Lestari menjalankan peran sebagai fasilitator. Dengan menjalankan peran fasilitator, BKM Mulyo lestari telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan fasilitas infrastruktur yang lebih baik lagi berupa pemukiman dasar maupun jalan yang lebih baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

C. Sosial

Dalam hal ini BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran sebagai fasilitator dan broker. Dengan menjalankan peran ini, BKM Mulyo lestari telah memfasilitasi dan menghubungkan masyarakat miskin dengan bantuan sosial yang tersedia. Dengan demikian maka masyarakat tetap dapat menjalani hidupnya.

5. Mengembangkan Jaringan

Dalam hal ini, BKM Mulyo Lestari melakukan perannya sebagai broker.

6. Mengawasi Proses Pelaksanaan BLM

Dalam kegiatan ini, BKM Mulyo Lestari telah melakukan peran broker dengan menjalankan prinsip *Quality Control*. *Quality control* dilakukan untuk menjamin

bahwa program yang dihasilkan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Hanif,dkk. 2009. *Pedoman Pengembangan Perencanaan*

Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah:

Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah.

Jakarta: Grasindo.

Daftar Pustaka

Buku

Achlis. 1983. *Praktek Pekerjaan Sosial*. Bandung: STKS.

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta.

_____. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Astuti, Mulia. 2003. *Model Bimbingan Bagi TKSM Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat: Pengembangan Konsep dan Uji Coba*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.

Damodiharjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pekerjaan Umum. Tanpa Tahun. *Modul Tugas dan Fungsi BKM*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaiora.

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tanpa Tahun. *Pedoman Teknik Kegiatan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementarian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. “*Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*”. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum.

Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Refika Aditama

Ross, Murray G. 2000. *Community Organization; Theory, Principle And Practice 2d Ed*. New York: Harper & Row, Publishers, Inc.

Santoso. 1999. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Walker, James W. 1992. *Human Resource Strategy*. Singapore: McGraw-Hill Companies, Inc.

Jurnal

Moordiningsih. Tanpa tahun. Jurnal Psikologi. Vol 33, No 2,1-15. “*Physician Decision Making*”.
Universitas Gajah Mada.

Internet

<http://kbbi.web.id/organisasi> diakses pada 15 September 2014

<http://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/kemiskinan/item301> Diakses pada tanggal 9 Oktober 2014

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo34.htm.
diakses pada tanggal 28 Agustus 2014

http://www.psikologizone.com/decision-making-pengambilan-keputusan/06511_842 diakses pada tanggal 15 September 2014

